

Beri Kesempatan Penyelenggara Pemilu untuk Bekerja Secara Profesional dan Independen

Kamis, 18-04-2019

MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau semua pihak menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil-hasil Pemilu yang secara resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan jiwa besar, ksatria, lapang hati, dan bijaksana.

“Jika terdapat persengketaan Pemilu hendaknya diselesaikan secara hukum yang dijamin konstitusi disertai jiwa musyawarah untuk kemaslahatan bersama sebagaimana menjadi karakter bangsa Indonesia yang religius, berbudaya luhur, dan terkandung dalam sila keempat Pancasila,” jelas Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (18/4) di kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta.

PP Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk *cooling down* yang ditunjukkan dengan sikap menahan diri, menjaga ketenangan, dan bersabar menunggu hasil penghitungan dan pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum.

“Masyarakat hendaknya tidak terlalu terpengaruh suasana oleh banyaknya hasil hitung cepat (*quick count*), *exit poll*, dan lain-lain yang disajikan di media massa, media sosial, dan ruang publik. Sebagai sebuah kerja ilmiah hasil-hasil survey merupakan sajian hitungan atau data yang patut dihormati, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi dan menentukan hasil Pemilu,” jelas Haedar.

PP Muhammadiyah mendesak KPU, Bawaslu, dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih profesional, jujur, adil, transparan, dan independen sehingga proses penghitungan dan hasil Pemilu betul-betul terpercaya, objektif, dan seksama serta diumumkan tepat waktu sehingga dapat diterima secara objektif oleh semua pihak.

“Mari kita beri kesempatan kepada penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional, jujur, adil, transparan, independen dan juga berharap pada pihak-pihak manapun untuk tidak melakukan tekanandalam bentuk apapun yang berakibat KPU dan Bawaslu bekerja tidak jujur dan profesional,” jelas Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas.

Sementara kepada Pemerintah dan aparat keamanan hendaknya dapat menjaga situasi pasca Pemilu 2019 dengan sebaik-baiknya serta mengayomi seluruh warga dan komponen bangsa dengan berdiri tegak di atas kepentingan umum sebagaimana fungsi pemerintahan yang diberikan konstitusi.